

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada tahun 2007, Hu Jintao dilantik kembali menjadi Presiden China melanjutkan periode yang lalu. Dalam periode keduanya, Hu Jintao memperkenalkan konsep “community of common destiny” melalui laporan Kongres Nasional Partai Komunis China ke-17. *Community of common destiny* dalam kebijakan luar negeri China bermaksud untuk membentuk komunitas kepentingan, komunitas pembangunan dan tanggung jawab, dan komunitas takdir bersama dengan negara-negara perbatasan (Swaine, 2015: 6). Konsep tersebut bertujuan untuk bersama-sama membangun dunia yang lebih baik dengan masyarakat dari negara-negara lain. Hal ini menggarisbawahi kesadaran negara bahwa masyarakat yang hidup di dunia memiliki takdir yang sama, sehingga negara memiliki tanggung jawab bersama untuk bersatu mengatasi masalah, mengupayakan pembangunan bersama, dan perdamaian abadi (Chinadaily.com.cn, “*A to Z of China’s Diplomacy Under Xi’s Leadership*”, 29 Juni 2016).

Konsep *community of common destiny* tidak jauh dari konfusianisme China. Konfusianisme merupakan filsafat China yang berasal dari pemikiran Konfusius atau dalam bahasa China dikenal dengan nama K’ung Tzu atau Tuan Kung (Yu-Lan, 2007: 47). Nilai-nilai yang ditanamkan Konfusius memiliki dampak yang tinggi bagi kehidupan masyarakat China, termasuk kehidupan politik China baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Salah satu pemikiran Konfusius terkait politik China yaitu seseorang harus memberikan kemampuan terbaiknya dalam berbuat baik kepada negara sebagai seorang warga negara, dan berbuat baik kepada dunia sebagai seorang warga dunia. Setiap manusia berkewajiban berbuat baik untuk negara dan bertanggung jawab atas perdamaian

dunia (Yu-Lan, 2007: 239). Pemikiran tersebut sesuai dengan salah satu nilai *community of common destiny* yaitu rasa tanggung jawab bersama sebagai masyarakat dunia untuk membangun negara.

Sesungguhnya setiap pemimpin China memiliki interpretasi yang berbeda-beda terkait nilai konfusianisme dalam pemikiran politiknya. Seperti halnya Hu Jintao dan Xi Jinping yang menggunakan *community of common destiny* sebagai salah satu tafsiran dari nilai konfusianisme politik China. Namun, kedua pemimpin China tersebut memiliki fokus yang berbeda terkait konsep *community of common destiny*.

Pada masa pemerintahan Hu Jintao, *community of common destiny* digunakan untuk menjelaskan hubungan khusus lintas selat antara China daratan dan Taiwan. Sejak saat itu, China sering menggunakan istilah ini untuk menekankan hubungan kerjasama yang unik dengan negara lain, terutama tetangga China. Hu Jintao mengkampanyekan *community of common destiny* pada pidatonya bulan Juni 2012 di KTT Organisasi Kerjasama Shanghai dan Laporan Kongres Partai Nasional ke-18 yang ia buat pada akhir kepemimpinannya tahun 2012 (The Diplomat, “*Can China Build a Community of Common Destiny*”, 28 November 2013).

Berakhirnya kepemimpinan Hu Jintao, ide *community of common destiny* tidak lantas hilang. Pada Kongres Nasional Partai Komunis China ke-18 tahun 2012, presiden baru Xi Jinping kembali mempromosikan dan menekankan *community of common destiny* sebagai platform kebijakan luar negeri China selama masa kepemimpinannya. Xi Jinping menyebarkan ide tersebut melalui berbagai kunjungan luar negeri, seperti kunjungan ke Afrika pada bulan Maret 2013, Forum Boao di awal 2013, dan selama kunjungan terakhir Xi Jinping ke negara-negara ASEAN. Dalam Konferensi Kerja Diplomatik dengan Negara-negara Tetangga pada tanggal 25 Oktober 2013 di Beijing, Xi Jinping secara khusus

menekankan kembali retorika Hu Jintao yang mengatakan bahwa diplomat China harus membangun kesadaran *community of common destiny* dari negara-negara tetangga” (The Diplomat, “*The Community of Common Destiny in Xi Jinping’s New Era*”, 25 Oktober 2017).

Di bawah pemerintahan Presiden Xi Jinping, ekspansi politik luar negeri China semakin luas dan tidak hanya terfokus pada hubungan bilateral China dengan negara perifer. Berprinsip pada *community of common destiny*, China berkomitmen untuk menjalankan pembangunan bersama dengan negara-negara perifer dengan cara membentuk komunitas bersama. Kemudian, Presiden Xi Jinping menegaskan implementasi prinsip-prinsip *community of common destiny* dalam proyek *One Belt and One Road* (OBOR) pada pidato pembukaan Konferensi Tahunan Boao Forum for Asia (BFA) 2015 di Boao, Provinsi Hainan, China selatan tahun 2015. Ia mengatakan:

“For Asia to move towards a community of common destiny and embrace a new future, it has to follow the world trend and seek progress and development in tandem with that of the world... To build a community of common destiny, we need to ensure inclusiveness and mutual learning among civilizations....The "Belt and Road" initiative, meeting the development needs of China, countries along the routes and the region at large, will serve the common interests of relevant parties and answer the call of our time for regional and global cooperation. In promoting this initiative, China will follow the principle of wide consultation, joint contribution and shared benefits. The programs of development will be open and inclusive, not exclusive.” (Crienglish.com, “*Xi Promotes Creation of a Community of Common Destiny in Asia at Boao*”, 28 Maret 2015).

OBOR merupakan salah satu kebijakan menonjol yang disebutkan dalam Rencana Lima Tahun ke-13 Presiden Xi Jinping. Konsep OBOR pertama kali dipresentasikan pada bulan September hingga bulan Oktober 2013 saat kunjungan Presiden Xi Jinping ke Kazakhstan dan Indonesia. OBOR akan menghubungkan China, Asia dan Eropa dalam hal perdagangan dan ekonomi melalui jalur darat (“the belt”) serta jalur maritim (“the road”) (Brødsgaard & Rutten, 2017: 163).

Dalam surat kabar online *the Diplomat* menyatakan bahwa promosi *community of common destiny* oleh Xi Jinping dianggap sebagai perlawanan keseimbangan terhadap kebijakan luar negeri Amerika Serikat yaitu “return to Asia” dan sebagai *counter* globalisasi ekonomi ala Barat. China mengambil pendekatan yang sedikit berbeda yang dapat digambarkan sebagai “strong and powerful but not tough”. China memfokuskan diri pada kebijakan ekonomi, bukan militer, berdasarkan fakta bahwa China sekarang merupakan negara ekonomi terbesar kedua di dunia dan masih meningkat, sementara kekuatan Amerika Serikat relatif menurun. Selain itu, China juga bermaksud untuk menunjukkan citra yang lebih baik dengan menekankan masyarakat pada takdir bersama, dan membuat sistem tata kelola global yang lebih adil (The Diplomat, “*Can China Build a Community of Common Destiny*”, 28 November 2013).

Berlawanan dari anggapan tersebut, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) justru mendukung *community of common destiny* yang ditawarkan oleh China. PBB mengundang Presiden Xi Jinping untuk berpidato dalam Pertemuan Tingkat Tinggi dengan pembahasan “Building the Community of Common Destiny of Mankind”. Dalam pertemuan tersebut, Petrus Thomson, Presiden sidang ke-71 Majelis Umum PBB, mengatakan bahwa konsep *community of common destiny* dari China telah menginspirasi negara-negara anggota PBB akan pentingnya menjaga perdamaian dunia dan pembangunan

berkelanjutan secara bersama-sama sebagai tanggung jawab bersama. Negara-negara bekerjasama menemukan solusi untuk tantangan global, seperti perang dan konflik, terorisme dan kekerasan, termasuk juga isu ringan seperti ketidaksetaraan, kemiskinan, dan perubahan iklim (United Nations, “*General Assembly of the United Nations: High Level Meeting on Building the Community of Common Destiny of Mankind*”, 18 Januari 2017).

B. Rumusan Masalah

Mengapa China menerapkan *community of common destiny* sebagai platform kebijakan luar negerinya dalam proyek *One Belt and One Road* (OBOR)?

C. Landasan Teori

1. Konstruktivisme

Dalam menjelaskan dunia politik, konstruktivisme memiliki tiga preposisi ontologi. Pertama, sejauh struktur dapat dikatakan membentuk perilaku aktor sosial dan politik, baik individu atau negara, konstruktivis berpendapat bahwa struktur normatif atau ideasional sama pentingnya dengan struktur material. Kedua, konstruktivisme berpendapat bahwa struktur non-material atau ideasional mempengaruhi identitas aktor, yang kemudian identitas tersebut membentuk kepentingan (*interest*), dan pada akhirnya berujung pada tindakan nyata (*action*). Ketiga, konstruktivisme meyakini bahwa terdapat hubungan saling membentuk (*mutually constituted*) antara agen dan struktur. Pada satu sisi mereka percaya bahwa struktur ide mempengaruhi perilaku, namun pada sisi yang lain mereka berargumen bahwa struktur ide ada karena dibentuk dan dipraktikkan dalam jangka waktu tertentu oleh para agen (Burchill, Linklater, & dkk, 2005: 196-198).

Christian Reus-Smit merupakan salah satu tokoh pemikiran konstruktivisme. Dalam buku *Theories of International Relations*, Reus-Smit mengatakan bahwa “*Constructivism is characterized by an emphasis on the importance of normative as well as material structures, on the role of identity in shaping political action and on the mutually constitutive relationship between agents and structures*” (Burchill, Linklater, & dkk, 2005: 188). Pernyataan tersebut dapat dikatakan sebagai simpulan dari tiga preposisi ontologi konstruktivisme yang telah dijelaskan sebelumnya.

Namun terdapat kelemahan dalam pemikiran Reus-Smit, ia tidak menunjukkan proses pembentukan identitas. Sehingga penulis mengadopsi pemikiran Peter Katzenstein untuk menyempurnakan penelitian. Dalam karya tulisnya yang berjudul *The Culture of National Security: Norms and Identity in World Politics* tahun 1996, Katzenstein menggunakan konsep norma untuk mendeskripsikan ekspektasi kolektif untuk perilaku aktor yang tepat dengan identitas yang telah melekat pada negara. Dalam beberapa situasi, norma-norma berlaku seperti peraturan yang menentukan identitas sebuah aktor, sehingga memiliki efek konstitutif atau saling membentuk antara identitas dan tindakan politik sebuah negara. Hal itu untuk mengenali sebuah tindakan politik yang relevan dengan identitas negara tersebut. Dalam situasi yang lain, norma beroperasi sebagai standar yang menentukan tindakan yang tepat dari identitas yang sudah ditentukan. Dengan demikian, norma memiliki efek regulatif yang menentukan standar perilaku yang tepat dari sebuah negara yang telah memiliki identitas. Jadi, norma menentukan (atau membentuk) identitas atau menetapkan (atau mengatur) perilaku, atau norma beroperasi pada keduanya (Katzenstein, 1996: 4).

China merupakan negara yang terkenal dengan tiga filsafat yaitu Konfusianisme, Taoisme, dan Buddhisme. Dari ketiga pemikiran tersebut, Konfusianisme

memberikan pengaruh besar bagi masyarakat China. Konfusianisme menjadi budaya China yang harus dipelajari ketika memasuki sekolah. Mereka wajib membaca buku empat dasar, yaitu Untaian Ajaran Konfusius (*Confucian Analects*), Buku Mencius (*Book of Mencius*), Pelajaran Agung (*The Great Learning*), dan Doktrin Jalan Tengah (*the Doctrine of The Mean*) (Yu-Lan, 2007: 1-3). Buku-buku tersebut menanamkan dan membentuk identitas karakter bangsa China dari sejak anak-anak. Awalnya, Konfusianisme hanya merupakan pemikiran dari Konfusius, kemudian menjadi pemikiran filsafat yang dianut oleh China. Konfusianisme mengatur seluruh kehidupan manusia, mulai dari diri sendiri, keluarga, negara, hingga dunia.

Berkaitan dengan dunia politik, Konfusianisme memberikan sumbangsih besar sebagai pedoman kebijakan politik China yang menggambarkan identitas China sebagai negara Konfusian. China mengambil nilai konfusianisme dalam pemikiran politiknya, sehingga China memiliki pendirian sendiri yang menjadi karakteristik China dalam percaturan internasional. Setiap presiden China memiliki tafsiran tersendiri dalam memaknai nilai konfusianisme politik China. Pada pemerintahan Xi Jinping, ia memperkenalkan *community of common destiny* sebagai kebijakan luar negerinya yang dianggap sebuah perwujudan dari nilai konfusianisme.

Menurut Vitali Rubin dalam karyanya berjudul "*The End of Confucianism?*" menyatakan bahwa teori politik Konfusius tetap tidak efektif kecuali memperhatikan etika, karena dalam intinya terletak perjuangan untuk membuat politik tunduk pada prinsip-prinsip etika. Negara Konfusianisme bertujuan untuk menjadikan negara dengan wajah manusia (Rubin, 1973: 73). Sehingga pola interaksi antarnegara dibentuk selayaknya pola interaksi antar manusia.

Dalam perumusan *community of common destiny*, Xi Jinping mengadopsi nilai konfusianisme yaitu

menciptakan hubungan bilateral dan multilateral yang positif didasarkan pada persahabatan, ketulusan, saling menguntungkan dan inklusivitas (The China Story, “*Shared Destiny – China Story Yearbook 2014*”, 05 November 2015). Nilai konfusianisme tersebut menunjukkan identitas China dalam politik internasional sebagai negara penganut filsafat Konfusianisme. Hal itu membentuk kepentingan China yaitu menciptakan sinergitas hubungan positif yang berasaskan konfusianisme dengan negara-negara sekitarnya. Sehingga China merumuskan *community of common destiny* sebagai alat negosiasi dalam pembentukan komunitas kawasan.

Selain tekanan domestik, China juga memperoleh tekanan dari luar yakni perkembangan globalisasi ekonomi ala Barat. Dalam menanggapi hal tersebut, China menggunakan *community of common destiny* sebagai *counter* China terhadap prinsip-prinsip kapitalisme yang digunakan dalam globalisasi ekonomi. Sehingga China berupaya membentuk globalisasi ala China dengan negara-negara berkembang lainnya. China kemudian membentuk *One Belt and One Road* (OBOR) untuk memperkuat nilai *community of common destiny* dan mewujudkan globalisasi ala China.

D. Argumen Penelitian

1. Penelitian ini berargumen bahwa China menganut filsafat konfusianisme yang berpengaruh pada perumusan *community of common destiny* sebagai kebijakan luar negeri China. *Community of common destiny* merupakan hasil interpretasi dari konfusianisme oleh Xi Jinping yang dinilai unik untuk menggambarkan karakter politik China.
2. Penelitian ini berargumen bahwa China menggunakan konsep *common destiny* untuk mengkonstruksi identitas yang sama diantara negara-negara anggota *One Belt One Road* (OBOR).

3. Penelitian ini berargumen bahwa China menggunakan *community of common destiny* sebagai *counter* nilai Barat dalam globalisasi ekonomi dengan prinsip kapitalisme. Perbedaan nilai antara China dan Barat menjadi landasan China membentuk *One Belt One Road* (OBOR) dengan prinsip *community of common destiny* sebagai manifestasi globalisasi ekonomi ala China.

E. Tujuan Penulisan

1. Tulisan ini bertujuan untuk menghubungkan pemikiran Konfusianisme dalam terciptanya konsep *community of common destiny* sebagai platform kebijakan luar negeri China.
2. Tulisan ini bertujuan untuk mengeksplorasi konsep *community of common destiny* sebagai *counter* nilai Barat dalam merespon globalisasi ekonomi ala Barat melalui *One Belt and One Road* (OBOR).
3. Tulisan ini bertujuan untuk mengimplementasikan teori hubungan internasional kedalam fenomena politik luar negeri China pada pembentukan *One Belt and One Road* (OBOR).

F. Jangkauan Penelitian

Jangkauan penelitian pada karya tulis ini adalah pengaruh pemikiran Konfusianisme terhadap terciptanya konsep *community of common destiny*, serta penerapan konsep *community of common destiny* dalam kebijakan luar negeri China. Kemudian peran *community of common destiny* sebagai *counter* nilai Barat melalui *One Belt and One Road* (OBOR). Mengacu pada jangkauan penelitian tersebut, penulis membatasi tahun penelitian yaitu pada tahun 2013 hingga tahun 2017.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam menulis karya tulis ini adalah metode kualitatif

yang bersifat eksplanasi. Metode kualitatif merupakan metode penelitian yang memiliki paradigma fenomenologi, sehingga proses penelitiannya lebih menekankan pada analisa fenomena tertentu, termasuk fenomena hubungan internasional. Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan analisis data sekunder yaitu melalui publikasi/buku, internet atau media lainnya, termasuk persyaratan yang perlu dipenuhi.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memperjelas bahasan pada karya tulis ini, maka penulis membagi lima bab bahasan dengan susunan sebagai berikut:

Bab I menjelaskan mengenai latar belakang China dalam menerapkan *community of common destiny* sebagai platform kebijakan luar negerinya dalam proyek *One Belt One Road* (OBOR), rumusan masalah, landasan teori, hipotesa, tujuan penelitian, jangkauan penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II membahas tentang pengaruh konfusianisme terhadap pemikiran politik China dari pemerintahan Mao Zedong hingga pemerintahan Xi Jinping dalam mengambil keputusan atau kebijakan politik. Lebih rinci, bab ini akan membahas dasar dari kebijakan politik luar negeri China beserta perubahan-perubahan arah politik luar negeri dari sudut pandang budaya China.

BAB III membahas lebih rinci tentang kebijakan luar negeri Xi Jinping hingga mengeluarkan konsep kebijakan *community of common destiny*. Komponen-komponen pembahasan dalam bab ini adalah arah, tujuan, dan sasaran kebijakan luar negeri China. Lebih khusus akan membahas alasan pemerintahan Xi Jinping untuk memakai konsep *community of common destiny* dalam politik luar negeri China.

BAB IV membahas tentang *counter* nilai yang dilakukan oleh China terhadap nilai-nilai Barat dalam perkembangan globalisasi ekonomi ala Barat. Bab ini

akan membahas upaya China dalam menciptakan globalisasi ekonomi ala China melalui *community of common destiny* dalam proyek *One Belt and One Road* (OBOR).

Bab V berisi rangkuman dari keseluruhan bab yang disusun dalam bentuk kesimpulan dan menjadi penutup dalam karya tulis ini.